

KETERLIBATAN INDONESIA DENGAN BRICS: ANTARA KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BEBAS DAN AKTIF SERTA KETERLIBATAN STRATEGIS YANG TERBATAS

Indah Dian Nurani Siregar¹, Ali Maksum²

¹²Magister Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹indahdian.work@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's national interests in its post-2025 membership in BRICS by employing the national interest framework, particularly classical realism. BRICS has evolved into a strategic alliance of emerging economies that exerts significant influence in the multipolar world order. However, to date, there has been no specific study examining Indonesia's position after formally joining BRICS, either from the perspective of foreign policy or national interest. Drawing on a literature-based method, this research reviews 85 Scopus-indexed journal articles (2020–2025), international media reports, and official government documents. The findings demonstrate that Indonesia's membership in BRICS reflects a rational effort to pursue vital and strategic interests, such as securing alternative financing through the BRICS New Development Bank (NDB), enhancing diplomatic influence in the Global South, and diversifying external partnerships. Within the framework of the "free and active" foreign policy.

Keywords: BRICS, National Interest, Indonesia, Free and Active, Foreign Policy

PENDAHULUAN

Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) Keanggotaan Indonesia dalam BRICS pada tahun 2025 menandai pergeseran signifikan dalam konstelasi politik luar negeri Indonesia. Sebagai negara yang sejak awal kemerdekaan memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, langkah ini menjadi awal memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana Indonesia mempertahankan prinsip tersebut dalam sebuah koalisi ekonomi-politik yang kerap diasosiasikan dengan poros non-Barat (RI, 2025). Di sisi lain, keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia dalam mengakses pembiayaan alternatif, memperluas pasar dan memperkuat posisi geopolitik Indonesia sebagai bagian dari negara *semi-periphery* (Melya Putri et al., 2023). Penelitian ini mengkaji kepentingan nasional Indonesia dalam BRICS pasca 2025 dengan menggunakan teori kepentingan nasional sebagai lensa analisis.

Fokus utama diarahkan pada identifikasi dan klasifikasi kepentingan vital strategis, dan sekunder Indonesia serta bagaimana prinsip bebas aktif diadaptasi dalam tatanan global multipolar. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur.

BRICS sebagai kekuatan geopolitik dan geoekonomi yang menjadi tantangan bagi blok Barat, bersamaan dengan negara *semi-periphery* lainnya institusi ini mewadahi pergeseran menuju tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar (Gehre, 2020). BRICS aktif dalam membangun sistem global kolaboratif dan inovatif sebagai pemberdayaan terutama dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan (Khakim & Zubaidi, 2024). Momentum Indonesia pada tahun 2025 bergabung dengan BRICS menjadi langkah baru Indonesia untuk memperluas jejaring diplomatik dan ekonomi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi yang semakin multipolar, BRICS dianggap sebagai alternatif terhadap dominasi Barat (Arbar, 2025). Bergabung dengan kelompok ini menjadi salah satu pengaruh hubungan Indonesia dengan negara-negara barat terutama Amerika Serikat, dan berpotensi menciptakan ketegangan di dalam ASEAN, dikarenakan Indonesia memiliki posisi penting dalam peran kepemimpinan (Lee et al., 2025). Tidak dapat terelakkan hal lainnya seperti ketegangan normatif juga menjadi salah satu polemik tambahan antara prinsip bebas-aktif Indonesia dengan karakter blok Timur (Maulana et al., 2024). Menjadi anggota baru dalam organisasi internasional yang di dominasi oleh blok tertentu bukan sebuah hal yang mudah, keberagaman latar belakang antar negara ideologi negara, politik, ekonomi, di antara anggota negara-negara BRICS memiliki potensi dalam menimbulkan konflik akibat ketidak konsistenan dalam merespons isu global (Maulana et al., 2024).

Keinginan Indonesia setelah resmi menjadi anggota BRICS penting untuk diketahui dikarenakan banyak hal di berbagai aspek yang dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia dalam mempererat kerja sama politik, ekonomi, keamanan hingga sosial budaya, selain karena Indonesia tidak hanya ingin mendapatkan sokongan dana dari negara-negara Blok Timur namun juga

membuat Indonesia tidak terlalu bergantung pada Blok Barat (BBC News, 2024). Konsistensi Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dalam kerangka keanggotaan (Balitbang, 2025). Berdasarkan pernyataan inti oleh Hans J Morgenthau ia mengatakan “kelangsungan hidup-perlindungan identitas fisik, politik dan budaya perambahan oleh negara-negara bangsa lain”. Lebih lanjut “konsep kepentingan nasional memang menjadi landasan kebijakan luar negeri suatu negara yang lebih modern. Hal ini dapat memberikan kriteria untuk pelaksanaan urusan luar negeri dan ukuran keberhasilannya (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948).

Peluang Indonesia pasca bergabung dengan BRICS banyak menawarkan sejumlah kesempatan strategis negara dari sebuah organisasi internasional dapat dilihat dari sumber data yang dikumpulkan bahwa salah satu keinginan Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas hal ini dikarenakan BRICS memiliki potensi pasar lebih dari 3 miliar jiwa, sehingga harapan yang diinginkan dalam memperoleh pangsa pasar yang jauh lebih besar agar produk-produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan tekstil dapat dijual dengan lebih luas (Balitbang, 2025). Selain itu, Indonesia tidak terlalu bergantung dengan negara-negara barat dan dapat mendiversifikasi mitra dagang. Hal lainnya dalam memberikan keuntungan potensi strategis yakni kerja sama dengan negara-negara BRICS seperti China dan India yang membuka peluang besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi domestik Indonesia (Balitbang, 2025). Namun demikian, bergabungnya suatu negara dalam suatu institusi kelompok tertentu tidak dapat terelakkan dari sejumlah tantangan yang harus dihadapi, sehingga dapat menjadi hambatan dalam kerja sama yang diinginkan, hal lainnya ialah adanya persaingan internal oleh negara-negara yang mendominasi mengakibatkan ketegangan dalam pengambilan keputusan kolektif lebih lanjut tekanan dari negara Barat yang tentunya tidak dapat dihindari sebagai penantang tatanan global Barat, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi secara langsung dari negara-negara Barat seperti Amerika. Di sisi lain kebutuhan

reformasi domestik dalam memanfaatkan peluang BRICS, Indonesia perlu lebih kuat dalam meningkatkan daya saing produk, hal ini sebagai bentuk dari reformasi di sektor industri, dan mengembangkan sumber daya manusia (Subinarto, 2025). Hal lainnya keanggotaan BRICS membutuhkan komitmen jangka panjang dan koordinasi yang kuat antar Kementerian serta stabilitas politik domestik agar manfaat yang diperoleh dapat optimal (Wardah, 2025).

Dalam mengkaji penelitian kepentingan Indonesia bergabung dengan BRICS, tulisan ini mengambil penelitian terdahulu untuk memberikan landasan yang relevan namun belum sepenuhnya menjawab pertanyaan bagaimana prinsip politik bebas aktif Indonesia dapat diintegrasikan dalam aliansi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khakim & Mahfud Zubaidi (Khakim & Zubaidi, 2024) mengenai *“The Indonesian Government’s Plan to Join BRICS Under Leadership of Prabowo Subianto”* penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pemerintah membingkai keanggotaan BRICS tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif hal ini menunjukkan bahwa ada dilema normatif, namun tidak mengupas secara mendalam dari aspek teoritis kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan analisis wacana dari narasi pemerintah, media, dan diskursus internasional. Substansi yang di bahas oleh Zubaidi berfokus pada narasi politik tentang rencana keanggotaan BRICS mengkaji persepsi dan wacana (*soft power framing*) dan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam membedakan klasifikasi kepentingan baik dalam vital sebagai stabilitas ekonomi, strategis pengaruh geopolitik di *Global South*, sekunder dalam hal diplomasi teknologi dan penguatan *soft power*, kontingensi dalam mitigasi resiko geopolitik BRICS vs G7. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ubaidi, karena tidak membahas teori kepentingan nasional secara komprehensif dan masih berfokus pada fase sebelum keanggotaan resmi Indonesia di BRICS (pra-2025). Dalam konteks keanggotaan Indonesia yang telah resmi dalam BRICS. Sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip bebas aktif diterjemahkan ke dalam dinamika dunia multipolar saat ini. (Khakim & Zubaidi, 2024).

Sementara itu, penelitian dari jurnal kedua oleh Asep Setiawan (Setiawan, 2025) yang membahas tentang “*Indonesia’s Join BRICS: Balancing Economic Opportunities and Geopolitical Challenges in a multipolar World*”. Pembahasan mengenai potensi dan kepentingan Indonesia dalam keanggotaan BRICS telah berkembang sejak lebih dari satu decade terakhir. Sejak awal 2010 silam, Indonesia telah beberapa kali disebut sebagai kandidat yang cukup potensial untuk menjadi anggota BRICS, meskipun hingga 2025 baru secara resmi bergabung. Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan penelusuran literatur akademik terkini menggunakan basis data Scopus, belum terdapat kajian ilmiah yang secara spesifik dan mendalam membahas posisi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS sebagai anggota tetap penuh. Sebagian besar studi yang ada masih bersifat prediktif atau eksploratif terhadap kemungkinan keanggotaan Indonesia, serta belum mengintegrasikan pendekatan teoritis kepentingan nasional secara sistematis.

Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh Sazmand (Sazmand, 2024), yang menyoroti ambiguitas Indonesia dalam merespon ajakan bergabung dengan BRICS sebelum 2025 studi tersebut menyebutkan bahwa meskipun Indonesia diundang untuk menghadiri KTT BRICS dan menunjukkan minat, namun komitmen formal Indonesia masih tertahan oleh kehati-hatian strategis, terutama karena pertimbangan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan orientasi ekonomi global yang lebih mengarah pada multilateralisme (Sazmand, 2024).

Namun tentu terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Studi oleh Mbara dan Graham (Mbara & Graham, 2024) menunjukkan bahwa diversitas kepentingan internal di antara anggota BRICS sering kali menghambat pencapaian konsensus, termasuk dalam isu-isu seperti penyatuan mata uang atau reformasi lembaga global. dalam konteks ini, Indonesia harus mempertimbangkan efektivitas BRICS sebagai forum strategis sebelum terlalu mengintegrasikan diri (Mbara & Graham, 2024). Selain itu, dinamika domestik turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Aktor domestik

seperti elite politik, pelaku usaha, dan kementerian sektoral memiliki agenda yang kadang sering bertentangan, hingga dapat memicu kebijakan luar negeri yang tidak konsisten terhadap blok-blok internasional seperti BRICS (Mursitama et al., 2013).

Penelitian terbaru oleh Putra, Akbar dan Aryaputra (Ahya & Putra, 2025) membaca keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS ialah sebagai langkah simultan yang menawarkan peluang ekonomi (akses pasar, FDI, pembiayaan melalui NDB) dan menimbulkan dilema geopolitik ketergantungan asimetris terhadap anggota besar BRICS, serta resiko tekanan dari mitra Barat. Penelitian mereka menggunakan kerangka *complex interdependence* dan *middle power diplomacy*, serta merekomendasikan Indonesia menerapkan *hedging/ dual track diplomacy* untuk menjaga otonomi. Disamping itu, keterkaitan teoritis yang di bahas oleh (Ahya & Putra, 2025) menafsirkan motif ekonomi strategis Indonesia yakni meliputi akses pembiayaan, pasar, dan energi sebagai *gain* dari kepentingan nasional yang bersentuhan dengan kepentingan vital dan strategis. Hal ini, sejalan dengan landasan realisme klasik di mana negara mengejar *survival* dan *power* melalui instrumen kebijakan luar negeri (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948) dan dapat diklasifikasikan menggunakan skema Holsti (vital, strategis dan kontingensi) (Holsti, 1974). Putra et al. memilih kerangka *complex interdependence* dan *middle power diplomacy* alih-alih realisme murni memberikan penekanan pada dimensi ekonomi/institusi (NDB, perdagangan) dan non militer. Namun, interpretasi mereka tetap kompatibel dengan realisme klasikal ketika menilai motif *survival/ power* di balik keputusan bergabung dengan BRICS. Penelitian ini mengisi gap empiris, penerapan kategori Holsti untuk kasus BRICS dan Indonesia sehingga menjembatani teori realisme dan pendekatan *neoliberal/* institusional kerja sama ekonomi.

Lebih jauh lagi, dalam penelitiannya Evan Laksmana (Laksmana, 2025) mempertanyakan apakah manuver-manuver Indonesia berubah menjadi *strategic alignment* khususnya terhadap Cina. Laksmana menekankan bahwa indikator-indikator keamanan dan kerja sama militer/strategis sebagai tanda

keberpihakan (*alignment*), yang menjadi peringatan bagi negara seperti Indonesia yang ingin mempertahankan otonomi, dalam pembahasannya Laksmana menawarkan sudut pengamatan keamanan/pertahanan yang penting untuk mengecek resiko *partitialty* menjadi *full alignment*.

Adapun analisis kebijakan menilai bahwa meskipun ada perubahan aktor pemerintahan, desain *free and active* Indonesia punya keberlanjutan artinya prinsip kebijakan memberikan legitimasi pada tindakan *multi alignment/hedging* (Saha, 2025). Liputan Reuters dan peristiwa diplomatik (kunjungan pejabat Cina/perjanjian perdagangan 2025) menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Cina terus menguat dalam hal investasi hal ini memberikan bukti empiris bahwa dinamika ekonomi bilateral menjadi salah satu variabel penggerak dalam keputusan bergabung dengan BRICS (Reuters, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pustaka ini semua sepakat bahwa tindakan Indonesia bersifat pragmatis yakni mencari keuntungan ekonomi sambil mencoba menjaga otonomi diplomatik. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS menghadirkan peluang dan tantangan yang kompleks. Studi-studi sebelumnya menekankan konflik antara orientasi non-blok Indonesia dengan karakter ideologis BRICS, serta potensi penguatan peran strategis Indonesia dalam forum global jika mampu mempertahankan prinsip bebas aktif secara lebih fleksibel. Namun, adanya perbedaan titik fokus pada pembahasan dari penelitian terdahulu yakni pembahasan di atas menitikberatkan dimensi ekonomi seperti (NDB, FDI) serta institusional OECD vs BRICS (Ahya & Putra, 2025). Pembahasan lainnya juga lebih konseptual dalam memperkenalkan *partial multialignment* dan indikator untuk mengukurnya (Wicaksana & Yakti, 2025), serta mengingatkan pentingnya indikator keamanan dan pertahanan negara untuk mendeteksi pergeseran dari *hedging* ke *alignment* (Laksmana, 2025). Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada kajian yang secara sistematis dan spesifik membahas elaborasi klasifikasi kepentingan nasional Indonesia dalam BRICS

menggunakan pendekatan teoritis seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau, Holsti atau Rosenau. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, keterlibatan Indonesia dalam forum seperti BRICS memunculkan pertanyaan penting bagaimana Indonesia menavigasi posisi strategisnya di tengah dinamika geopolitik multipolar? Meskipun terdapat berbagai kajian terkait BRICS dan Indonesia, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek ekonomi. Penelitian yang mengkaji keanggotaan Indonesia dalam BRICS berdasarkan perspektif kepentingan nasional masih terbatas. Penelitian ini berkontribusi untuk melengkapi penelitian terdahulu yang belum membahas kepentingan nasional Indonesia serta mengevaluasi tindak lanjut kebijakan luar negeri Indonesia di BRICS.

Kerangka Penelitian

Perspektif kepentingan nasional seperti yang dikemukakan oleh Hans J Morgenthau dalam Kepentingan nasional sebagai landasan kebijakan luar negeri dalam studi hubungan internasional (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948). Konsep kepentingan nasional menjadi titik tolak dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan perspektif konseptual Hans J Morgenthau (1948), sebagai pelopor mazhab realisme klasik, Morgenthau menekankan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan antar negara, dan keputusan luar negeri dimana hal ini didasarkan pada kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan. Menurut Morgenthau *"The meaning of national interest is survival the protection of physical, political, and cultural identity against encroachments by other nations states"* (Hans J. Morgenthau & Alfred A. Knopf, 1948). Dengan kata lain, kepentingan nasional mencakup perlindungan terhadap eksistensi fisik, politik, dan budaya negara dari ancaman eksternal. Kepentingan tersebut menjadi kompas navigasi strategis bagi negara dalam mengarahkan keterlibatannya dalam dinamika internasional

Lebih lanjut, secara mendalam teori kepentingan nasional realisme klasik Morgenthau menegaskan bahwa politik antar negara digerakkan oleh

kepentingan nasional yang esensial beberapa hal yang dianut ialah *survival* yakni benteng utama realisme klasik yang dipahami bahwa negara tidak hanya mempertahankan eksistensi fisiknya (teritorial, keamanan militer), tetapi juga kelangsungan identitas politik, budaya, dan sistem eksistensialnya terhadap tekanan eksternal. *Power*, ialah kemampuan materiil maupun non-materiil (ekonomi, diplomatik, posisi tawar) untuk mempengaruhi lingkungan internasional agar memenuhi kepentingan nasional. *Strategic interest* kepentingan yang lebih spesifik tetapi bersifat fundamental, misalnya menjaga akses terhadap sumber daya, keamanan maritim, menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah sekitarnya. Jika mengaitkan dengan relevansi untuk Indonesia adanya keinginan kuat dalam menjaga otonomi diplomatik, yaitu bebas dari tekanan luar dalam keputusan luar negeri, namun tetap bisa melakukan hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa harus merasa “terikat” ke pihak manapun. Di sisi lain, Indonesia juga ingin memperbesar pengaruh globalnya seperti dalam forum *Global South*, forum ekonomi internasional lainnya serta pemerintahan global agar dapat memajukan agenda nasionalnya dan ikut menentukan aturan internasional.

Adapun dalam hal *Supporting Concepts Free and Active Foreign Policy Doctrine* (Politik luar negeri bebas dan aktif) lahir dari sejarah diplomasi Indonesia setelah kemerdekaan memiliki makna bebas memilih dengan siapa bekerja sama, tidak memihak blok kekuatan besar, tetapi aktif dalam diplomasi internasional, multilateral, isu moral dan normatif seperti perdamaian, keadilan dan kerjasama Selatan-Selatan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dan otonomi dapat memilih aliansi pragmatis, dan dapat mengambil posisi jika ada isu internasional yang sesuai dengan kepentingan dan nilai domestikanya. Selain itu, mengenai *Multi-alignment Strategy/Partial Multi-Alignment* bermaksud bahwa strategi diplomasi modern untuk negara berstatus *middle power* negara tidak berpihak sepenuhnya (*fully aligned*) ke satu blok kekuasaan, melainkan menyeimbangkan dengan menjalin hubungan strategis ke beberapa pihak sesuai kebutuhan seperti ekonomi, keamanan dan diplomasi. Hal ini

termasuk juga dalam “*hedging*” *corporation dual/non-exclusive*, retorika netral tapi menggunakan tindakan pragmatis dalam proyek kerja sama, sebagai tambahan dalam membantu negara Indonesia mempertahankan *survival* dan *power* dalam situasi multipolar, menjaga agar tidak terjebak dalam konflik antara kekuatan besar. Sebagaimana dijelaskan dalam konteks regional, *hedging* merupakan strategi keamanan untuk mengurangi risiko ancaman dengan tetap menjalin hubungan baik dengan kedua kubu yang bersaing (Azzqy & Awal, 2023).

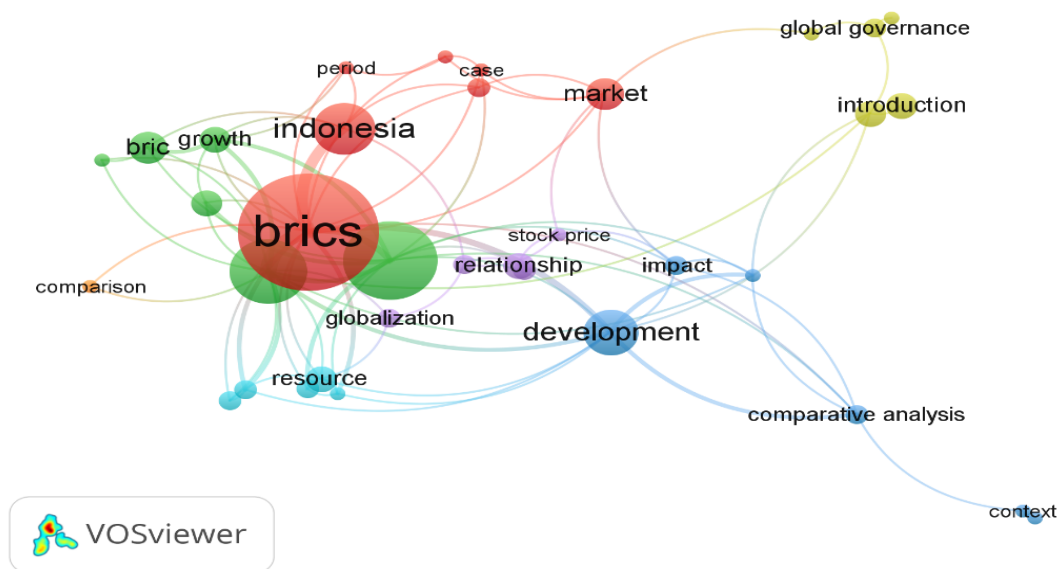
Menurut pandangan lainnya terkait klasifikasi kepentingan nasional oleh K.J Holsti (Holsti, 1974) mengelompokkan kepentingan nasional ke dalam empat kategori untuk memudahkan identifikasi dan analisis kepentingan nasional secara sistematis yaitu: vital, strategis, sekunder, kontingensi. Relevansi kerangka teori dalam penelitian menggunakan konsep perspektif nasional dari Morgenthau, Holsti. Dengan kerangka yang telah di jabarkan penelitian ini mengklasifikasi kepentingan Indonesia secara (vital, strategis dan sekunder) secara sistematis, menganalisis posisi bebas aktif Indonesia dalam aliansi multipolar BRICS serta mengevaluasi apakah keanggotaan tersebut konsisten atau justru bertentangan dengan nilai dasar kebijakan luar negeri Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode kualitatif, data dicari menggunakan keyword seperti BRICS, Indonesia, *Foreign Policy*, dan National interest peneliti menggunakan VOSviewer. Data diperoleh dari Scopus berdasarkan pemetaan bibliometrik melalui VOSviewer, Selama ini, kajian yang menggunakan kata kunci BRICS dan Indonesia cenderung terpusat pada aspek ekonomi makro, seperti perdagangan, pasar, dan pembangunan (sebagaimana terlihat dalam kluster *market*, *development*, dan *growth*). Di sisi lain, topik strategis seperti kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka teori hubungan internasional masih belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan perspektif kepentingan

nasional dari Hans J. Morgenthau guna menganalisis posisi dan dinamika Indonesia sebagai anggota BRICS setelah tahun 2025. Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai motif kepentingan nasional politik luar negeri Indonesia dalam bergabung dengan BRICS. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari 85 artikel jurnal scopus yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025, serta berbagai sumber berita seperti BBC, CNBC, dan situs resmi pemerintah Indonesia.

Gambar 1. Pemetaan Bibliometrik dengan Kata Kunci BRICS



PEMBAHASAN

Keanggotaan resmi Indonesia dalam BRICS pada tahun 2025 merupakan momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, yang menandai perubahan arah keterlibatan global sekaligus membuka pertanyaan mendalam tentang bagaimana Indonesia menavigasi arah kepentingannya dalam forum multipolar. Berdasarkan analisis literatur terkini menggunakan Scopus, ditemukan bahwa pembahasan mengenai BRICS secara umum telah berkembang dengan pesat, terutama dalam isu-isu makroekonomi, investasi, peran geopolitik, dan tantangan multilateral. Namun demikian belum terdapat

kajian ilmiah secara spesifik membahas keanggotaan Indonesia pasca bergabung dalam BRICS, baik dari sisi kebijakan luar negeri, strategi geopolitik, maupun kepentingan nasional.

Hasil pemetaan dalam Scopus menunjukkan bahwa kajian BRICS banyak berfokus pada aspek ekonomi seperti peningkatan investasi langsung asing (FDI), integrasi pasar modal, dan prediksi indikator makroekonomi melalui model hibrid misalnya kombinasi regresi linear dan jaringan saraf tiruan. BRICS juga ditandai sebagai kekuatan kolektif dengan ekonomi yang saling melengkapi yang berkontribusi pada dominasi ekonomi yang meningkat dari 10% PDB dunia pada 1990 menjadi sekitar 25% dalam beberapa tahun terakhir. Namun di tengah perhatian besar terhadap dinamika makroekonomi dan tatanan global baru, posisi Indonesia sebagai negara anggota baru berasal dari Asia Tenggara belum menjadi subjek kajian strategis yang mendalam, khususnya dalam perspektif kebijakan luar negeri dan realisme politik internasional. Melalui pendekatan konseptual berdasarkan pemikiran Hans J. Morgenthau tentang kepentingan nasional yang berada dalam wadah realisme klasik, di dalam kerangka realisme kepentingan nasional adalah konsep sentral. Morgenthau menekankan bahwa politik antar negara di dorong oleh kepentingan nasional yang didefinisikan dalam bentuk kekuasaan. Dalam teori realisme klasik yang dikembangkan oleh Morgenthau, konsep kepentingan nasional merupakan landasan utama dalam menjelaskan perilaku negara dalam hubungan internasional yang di definisikan dalam bentuk kekuasaan serta klasifikasi yang ditawarkan oleh K.J Holsti, memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam tatanan multipolar yang sedang terbentuk. Dalam konteks realisme klasik, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia bertindak secara rasional dalam mengejar *survival* dan kemakmuran nasional.

Tabel 1. Contoh Penerapan BRICS Berdasarkan Jenis Kepentingan

Jenis kepentingan	Penjelasan	Contoh penerapan konteks BRICS
Vital	Menyangkut kelangsungan hidup negara seperti keamanan nasional dan stabilitas ekonomi	Akses pembiayaan dari BRICS New Development Bank (NDB): ketahanan energi dan pangan
Strategis	Menunjang posisi dan pengaruh negara di Kawasan atau dunia internasional	Peran aktif Indonesia di <i>Global South</i> dan reformasi tata Kelola global
Sekunder	Tidak secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup negara, namun tetap penting	Transfer teknologi kerja sama riset, Pendidikan dan digitalisasi
Kontingensi	Kepentingan yang muncul akibat kondisi tertentu atau perubahan situasi	Respons terhadap ketegangan antara blok Barat- BRICS posisi netral dalam konflik geopolitik

Klasifikasi ini berguna untuk melihat Tingkat urgensi dan prioritas dari berbagai kepentingan yang dimiliki Indonesia dalam forum seperti BRICS (Holsti, 1974). BRICS menyediakan ruang untuk memenuhi kepentingan strategis Indonesia dalam skala internasional. Sebagai negara demokratis di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi menengah dan jaringan diplomatik luas. Indonesia memiliki posisi unik untuk memperkuat suara *Global South* dalam isu-isu global seperti reformasi tata kelola lembaga internasional (PBB, IMF, WTO), transformasi digital, dan perubahan iklim. Dalam kerangka BRICS+. Keterlibatan aktif Indonesia juga membuka jalan bagi diplomasi

Kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam agenda pembangunan global. Kendati demikian, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi dilema normatif yang muncul dalam konteks prinsip bebas aktif. Sejak 1948, prinsip ini menjadi fondasi utama Indonesia dalam merumuskan arah diplomasi Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh Mohammad Hatta bahwa Indonesia harus bebas dari keterikatan blok mana pun namun tetap secara aktif bersuara dan berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Dalam forum seperti BRICS yang sering dianggap sebagai koalisi tandingan terhadap dominasi negara Barat, Indonesia dihadapkan pada resiko identifikasi sebagai bagian dari blok tertentu. Resiko ini dapat berimplikasi pada hubungan bilateral maupun regional, terutama dengan mitra tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Kepentingan Ekonomi dan Finansial

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS memberikan akses peluang strategis ke dalam fondasi ekonomi nasional. Akses terhadap pembiayaan alternatif melalui BRICS New Development Bank (NDB) menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan mekanisme pembiayaan lain dalam proyek-proyek nasional strategis seperti infrastruktur, energi dan transformasi digital (Sazmand, 2024). Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia.

Literasi dari Scopus menggaris bawahi bahwa BRICS semakin menjadi pusat kekuatan ekonomi baru yang saling melengkapi, sehingga peluang pembiayaan dan kerja sama ekonomi lebih terbuka (Sumadinata, 2024). Selain itu, BRICS membuka jalan bagi diversifikasi ekonomi melalui perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-Barat yang berjumlah lebih dari tiga miliar jiwa, dengan komoditas utama Indonesia seperti CPO, batu bara, dan tekstil memiliki peluang penetrasi yang lebih luas. Dari perspektif realisme klasik, langkah ini

mencerminkan kepentingan vital Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kelangsungan hidup nasional (Balitbang, 2025).

Leverage Diplomatik dan Solidaritas Global South

Penguatan posisi diplomatik dan peran Indonesia di *Global South* sebagai bentuk kepentingan strategis. BRICS menjadi salah satu wadah bagi negara-negara berkembang memberikan Indonesia kesempatan sebagai ruang dalam memperkuat perannya sebagai *middle power* yang aktif di kawasan Asia Tenggara dan *Global South*, melalui forum keanggotaan ini Indonesia berpotensi memiliki peran lebih besar dalam isu keadilan global, termasuk reformasi tata kelola lembaga internasional serta meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia dalam agenda reformasi tata kelola dunia seperti reformasi Dewan keamanan PBB, dan memperkuat posisi tawar di forum internasional lainnya (Vorotnikova, 2025).

Literatur yang menjadi sumber data menegaskan bahwa Indonesia dapat menggunakan BRICS sebagai panggung untuk mengartikulasikan kepentingan regional dan globalnya (Wicaksana & Yakti, 2025). Mereka menyebut bahwa konsep *non-alignment* tradisional tidak lagi cukup, Indonesia kini memakai *partial multi-alignment*, yakni berjaring strategis ke banyak aktor tanpa ikatan eksklusif. Perbedaannya (Wicaksana & Yakti, 2025) lebih konseptual empiris dalam mendefinisikan istilah *partial multi-alignment* dan memberikan kerangka kritis untuk mengukur derajat *alignment*.

Doktrin Politik Luar Negeri dan Otonomi Strategis

Sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri bebas aktif menjadi fondasi utama Indonesia dalam diplomasi. Dalam konteks multipolaritas saat ini, prinsip tersebut dijalankan secara adaptif melalui strategi multialignment menjalin kemitraan dengan berbagai kekuatan tanpa terikat pada blok tertentu (Anwar, 1994). Bergabung dengan BRICS, Indonesia menunjukkan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan politik sambil tetap melanjutkan hubungan dengan OECD dan mitra tradisional lainnya (Rosyidin, 2023). Strategi

ini mencerminkan upaya menjaga otonomi diplomatik, sekaligus menghindari jebakan rivalitas kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Cina (Pugliese, 2024).

Resiko dan Tantangan

Selain itu, tantangan dan resiko geopolitik dan internal berupa ketegangan hubungan dengan mitra tradisional Barat dan kompleksitas mengelola perbedaan kepentingan dalam forum BRICS yang beranggotakan negara dengan latar belakang dan agenda berbeda (Patrick, 2024). Namun demikian, dinamika domestik yang melibatkan berbagai aktor politik dan ekonomi berpotensi mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam BRICS. Studi terkait menyoroti perlunya diplomasi cermat dan manajemen kepentingan yang baik untuk mengatasi tantangan ini (Mursitama et al., 2013). Meskipun menawarkan peluang besar, keanggotaan Indonesia di BRICS menghadirkan sejumlah tantangan.

Pertama, terdapat resiko keberpihakan strategis *partiality* yang dapat melemahkan kredibilitas politik bebas aktif Indonesia, khususnya jika dominasi Cina dan Rusia semakin menekankan proses pengambilan keputusan di BRICS (Laksmiana, 2025). Kedua, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan dari mitra tradisional seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa, yang dapat memengaruhi hubungan dagang, diplomasi, maupun dukungan politik di forum internasional (Patrick, 2024). Pada tingkat domestik, koordinasi antar kementerian dan aktor-aktor politik serta ekonomi menjadi faktor yang dapat menentukan konsistensi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia di BRICS sangat ditentukan oleh kapasitas manajemen diplomasi adaptif dalam menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi dan resiko geopolitik (Mursitama et al., 2013).

Dalam menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif secara adaptif Indonesia mempertankan prinsip tersebut dengan secara aktif melalui strategi multi-alignment, yakni berperan aktif tanpa terjebak dalam blok kekuatan

tertentu. Hal ini menunjukkan, fleksibilitas diplomasi Indonesia dalam menjaga otonomi strategisnya di tengah persaingan global, sebagaimana dipaparkan dalam literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan dinamika persaingan AS-Cina (Pugliese, 2024). Sedangkan dalam pendekatan dinamis terhadap kepentingan nasional James N. Rosenau (J. Rosenau, 2006) menekankan bahwa kepentingan nasional bisa berubah tergantung pada konteks domestic dan internasional, serta persepsi aktor-aktor politik. Menurut definisi kepentingan nasional bisa berubah tergantung siapa yang memformulasikan dan dalam kondisi apa. Dalam kerangka ini, keanggotaan Indonesia di BRICS tahun 2025 dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi kebijakan luar negeri terhadap dinamika global dan kebutuhan domestic. Rosenau menekankan *“national interest is a constructed among elite actors and shifts based on political demands and international positioning”* Rosenau, (J. N. Rosenau, 2006).

Prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia sebagai panduan semenjak kemerdekaan Indonesia telah menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam pidato historisnya pada tahun 1948, Mohammad Hatta wakil presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa “politik luar negeri bebas aktif ialah, Indonesia secara bebas tidak memihak kekuatan manapun yang bertentangan dalam dunia ini. Aktif, karena kami bekerja untuk perdamaian dunia dan menhaus penjajahan di seluruh muka bumi” (hatta, 1948) (Sadewa & Hakiki, n.d.). Dalam konteks keanggotaan Indonesia bergabung dengan BRICS, prinsip ini menjadi relevan karena Indonesia tidak boleh terjebak dalam poros geopolitik tertentu (blok Timur ataupun blok Barat), Indonesia harus menekankan prinsip ini agar keterlibatan dalam BRICS dimaknai sebagai strategis aktif untuk memperkuat posisi Indonesia tanpa kehilangan otonomi diplomatiknya.

Lebih lanjut, prinsip ini memungkinkan Indonesia menjadi jembatan antara kekuatan besar, dan memainkan peran sebagai middle power dalam sistem multipolar. Anwar menambahkan prinsip bebas aktif juga bersifat

fleksibel dan adaptif, seperti yang di bahas oleh Dewi Fortuna bahwa “bebas aktif bukanlah netralitas yang secara mutlak, tetapi kemampuan untuk menjalankan diplomasi tergantung secara eksklusif pada kekuatan besar tertentu (Anwar, 1994). Dari sisi prinsip, Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri “bebas aktif” yang berangkat dari semangat non-blok dan otonomi strategis. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga hubungan seimbang dengan kekuatan besar seperti aliansi Amerika Serikat dan Cina tanpa terikat pada aliansi ideologis militer. Menurut (Lau, 2024) dan (Rosyidin, 2023) menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi Indonesia untuk secara tegas memihak pada blok tertentu, termasuk BRICS, yang dalam banyak hal dipersepsikan sebagai entitas tandingan terhadap dominasi Barat.

Dari segi sisi manfaat, sejumlah studi memperlihatkan keanggotaan BRICS dapat memperkuat pengaruh global dan posisi negosiasi Indonesia dalam tatanan multipolar yang sedang terbentuk. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksana & Yakti, 2025) dan (Vorotnikova, 2025) menekankan bahwa aliansi seperti BRICS memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mendiversifikasi aliansi dan meningkatkan kapasitas diplomatik dalam forum global, hal ini selaras dengan strategi *multi-alignment* yang mulai dijalankan Indonesia. Keuntungan lainnya dikemukakan dalam literatur adalah peluang peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, terutama melalui hubungan yang semakin erat dengan Cina dimana posisinya sebagai mitra utama BRICS dan investor besar di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur strategis seperti dari visi poros maritim dunia (Tjhin, 2012).

Walaupun demikian, prinsip bebas aktif bersifat adaptif, bukan menjadi hal yang kaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Dewi Fortuna Anwar (1994), kebijakan luar negeri Indonesia tetap bisa bebas aktif dalam arti tidak tunduk secara ideologis, tetapi mampu melakukan arah diplomatik berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS justru bisa menjadi ekspresi baru dari prinsip tersebut yakni aktif

memperjuangkan kepentingan strategis nasional dalam kerangka kerja sama multipolar, tanpa harus kehilangan independensi atau kredibilitas sebagai negara non-blok. Dalam aspek yang disebutkan, penelitian ini juga menegaskan pentingnya diplomasi adaptif bagi Indonesia. Keikutsertaan dalam BRICS harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat daya tawar Indonesia secara global, sekaligus mempertahankan jati diri politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia perlu mengambil peran sebagai penyeimbang dan jembatan komunikasi antara poros kekuatan besar dunia, serta memimpin agenda-agenda progresif di dalam BRICS, termasuk kerja sama pembangunan berkelanjutan, tata kelola digital dan pemberdayaan ekonomi negara-negara berkembang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS adalah pilihan strategis yang selaras dengan prinsip realisme dalam hubungan internasional. Namun implementasinya harus dijalankan dengan kehati-hatian yang normatif agar tidak menyimpang dari prinsip kebijakan luar negeri nasional. Dalam konteks belum tersedianya kajian yang membahas posisi Indonesia secara mendalam pasca keanggotaan BRICS, studi ini menawarkan sumbangsih teoritis dan praktis yang signifikan bagi akademisi dan perumus kebijakan luar negeri untuk Indonesia di masa depan.

KESIMPULAN

Keanggotaan resmi Indonesia dalam pada tahun 2025 mencerminkan langkah strategis dalam arah baru kebijakan luar negeri Indonesia yang dilandasi oleh kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif. Berdasarkan data literatur dari 85 artikel ilmiah Scopus, sumber berita internasional, serta pendekatan teoritis realisme klasik ala Hans J. Morgenthau dan klasifikasi kepentingan nasional K.J Holsti, ditemukan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS memenuhi kepentingan vital seperti stabilitas ekonomi dan pembiayaan pembangunan melalui NDB, serta kepentingan strategis berupa peningkatan daya tawar diplomatik di tingkat global. Meski, dihadapkan pada tantangan geopolitik dan dilema normatif terhadap prinsip bebas aktif.

Indonesia menunjukkan kemampuan adaptif melalui pendekatan *multi-alignment* dan posisi sebagai *middle power* yang menjembatani blok kekuatan besar. Penelitian ini bisa mengisi kekosongan dalam kajian akademik yang sebelumnya belum banyak membahas posisi Indonesia secara teoritis pasca resmi menjadi anggota BRICS. Dan menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum multipolar ini tidak hanya memperkuat posisi globalnya, tetapi juga menjadi ekspresi baru dari diplomasi bebas aktif yang lebih fleksibel, fungsional, dan kontekstual di tengah dinamika tatanan dunia yang berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahya, F., & Putra, A. (2025). *Indonesia 's Membership in BRICS : From Economic Growth Opportunities to Geopolitical Challenges*. 13(2).
- Anwar, D. F. (1994). *Indonesian's Foreign Policy After the Cold War*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1355/9789812306845-011>
- Arbar, T. F. (2025). Menlu Sugiono Buka-bukaan Alasan Sebenarnya RI Gabung BRICS. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250110112840-4-602211/menlu-sugiono-buka-bukaan-alasan-sebenarnya-ri-gabung-brics>
- Azzqy, A., & Awal, S. (2023). ANSWERING THE FORMATION OF AUKUS IN THE ASIA PACIFIC REGION USING INDONESIAN FREE AND ACTIVE PRINCIPLES. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 251-266. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1890>
- Balitbang. (2025). *Indonesia Bergabung dengn BRICS, Apa Manfaat serta Kerugiannya, dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>
- BBC News. (2024). *Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS – Barisan negara yang 'tidak puas' dengan status quo?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o>
- Gehre, T. (2020). The history of BRICS' International Relations (2009-2019): discourses, innovation and sensitivities. *Conjuntura Austral*, 11(53), 161–179. <https://doi.org/10.22456/2178-8839.97954>
- Hans J. Morgenthau, & Alfred A. Knopf. (1948). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. <https://dacemirror.sci-hub.se/journal-article/0ccaa260082dd5a9c0bc99672aba015f/padelford1949.pdf#navpane>

s=0&view=FitH

- Holsti, K. J. (1974). National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 241.
- Khakim, A., & Zubaidi, M. (2024). *The Indonesian Government's Plan to Join BRICS Under the Leadership of Prabowo Subianto*.
- Laksmiana, E. A. (2025). Is Indonesia Sleepwalking into Strategic Alignment with China? *Survival*, 67(1), 61–67. <https://doi.org/10.1080/00396338.2025.2459017>
- Lau, J. M. (2024). *Indonesia's security relationship with the European Union: Prospects and possibilities for growth*. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4453-4_9
- Lee, B. T. F., Sims, J. P., & Lee, Y. T. (2025). BRICS Expansion: Threat or Opportunity for ASEAN? *India Quarterly*, 81(2), 130–157. <https://doi.org/10.1177/09749284251328226>
- Maulana, M., Tonggo, C., & Darodjat, R. (2024). LEGAL PERSONALITY OF BRICS AND IMPLICATION TOWARD INDONESIA'S FOREIGN TRADE POLICY AFTER JOINING AS NEW MEMBER. *Transnational Business Law Journal*, 5. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i2.2152>
- Mbara, G. C., & Graham, S. (2024). Is BRICS Losing its Global Relevance? A Retrospective View of the 2023 Summit in Johannesburg, South Africa. *African Renaissance*, 21(3), 123–146. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2024/21n3a6>
- Melya Putri, F., Panji, M., & Santoso, T. (2023). *BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation*.
- Mursitama, T. N., Abdullah, I., Dewanto, A. P., & Hadi, S. (2013). The intertwining of domestic actors and interests: A case of Indonesia's economic diplomacy toward ASEAN China free trade agreement. *International Business Management*, 7(4), 359–367. <https://doi.org/10.3923/ibm.2013.359.367>
- Patrick, S. (2024, October 9). BRICS Expansion, the G20, and the Future of World Order. *Carnegie Endowment for International Peace*. <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/brics-summit-emerging-middle-powers-g7-g20?lang=en>
- Pugliese, G. (2024). The European Union and an “Indo-Pacific” Alignment. *Asia-Pacific Review*, 31(1), 17–44. <https://doi.org/10.1080/13439006.2024.2334182>
- Reuters. (2025, May 25). China wants to work with Indonesia to tackle risks, challenges, Premier Li says. *Reuters.Com*. <https://www.reuters.com/world/china/china-wants-work-with-indonesia-tackle-risks-challenges-premier-li-says-2025-05->

25/?utm_source=chatgpt.com

- RI, K. (2025, February 4). *Indonesia Bergabung dengan BRICS, Apa manfaat Serta Kerugiannya dan Bagaimana Stareti Pelaksanaannya*. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>
- Rosenau, J. (2006). *The Study of World Politics Volume 1: Theoretical and Methodological Challenges*. Routledge.
- Rosenau, J. N. (2006). Globalization and governance. *The Study of World Politics: Volume 2: Globalization and Governance*, 2, 1–260. <https://doi.org/10.4324/9780203087787>
- Rosyidin, M. (2023). Playing Identities, Preserving Interests: Balance of Identity and Indonesia's Foreign Policy Dilemma Amid the China-US Rivalry. *Asian Perspective*, 47(2), 267–290. <https://doi.org/10.1353/apr.2023.0014>
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (n.d.). *DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA MELALUI GERAKAN NON-BLOK (GNB) FREE ACTIVE FOREIGN POLICY DYNAMICS OF INDONESIA THROUGH THE NON-ALIGNED MOVEMENT (NAM)*.
- Saha, R. (2025, December 11). Indonesian foreign policy is still free, more active. *Lowyinsitute.Org*. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesian-foreign-policy-still-free-more-active?utm_source=chatgpt.com
- Sazmand, B. (2024). Global south and brics: Why indonesia does not join brics? *Countries Studies*, 2(2), 331–351. <https://doi.org/10.22059/jcountst.2024.371523.1103>
- Setiawan, A. (2025). Indonesia's Joins BRICS: Balancing Economic Opportunities and Geopolitical Challenges in a Multipolar World. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3>
- Subinarto, D. (2025, February 11). Tantangan Indonesia di BRICS. *Balipost.Com*. <https://www.balipost.com/news/2025/02/11/441478/Tantangan-Indonesia-di-BRICS.html>
- Sumadinata, R. W. S. B. G. Y. Y. M. B. A. (2024). The Global Maritime Fulcrum and Its Repercussions on Indonesian Free and Active Foreign Policy (2014-2019). *Insight Turkey*, 26(2), 279–298. <https://doi.org/10.25253/99.2024262.14>
- Tjhin, C. S. (2012). Indonesia's relations with China: Productive and pragmatic, but not yet a strategic partnership. *China Report*, 48(3), 303–315. <https://doi.org/10.1177/0009445512462303>

- Vorotnikova, T. (2025). What Does it Seek in a Far Country? Factors of Latin American Countries' Interest in BRICS. *World Economy and International Relations*, 69(4), 83–96. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2025-69-4-83-96>
- Wardah, F. (2025). *Resmi Jadi Anggota BRICS, Menlu Sugiono: Indonesia Dipandang Sebagai Negara Penting*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/resmi-jadi-anggota-brics-menlu-sugiono-indonesia-dipandang-sebagai-negara-penting/7933795.html>
- Wicaksana, I. G. W., & Yakti, P. D. (2025). Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/trn.2025.1>